

Dampak Bencana Pada Pendidikan di Era Pasca Covid-19 : Tanggapan Kebijakan dan Strategi Ketahanan di Indonesia

Azka Murfiqoh

Mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal
* Correspondence e-mail; azkamurfiqoh199@gmail.com

Article history

Submitted: 2025/03/01; Revised: 2025/03/11; Accepted: 2025/04/01

Abstract

The COVID-19 pandemic has highlighted the vulnerabilities of education systems globally, particularly in disaster-prone countries like Indonesia. This study examines the multidimensional impacts of disasters on education in the post-pandemic era, analyzes government policies aimed at mitigating these impacts, and proposes strategies for building more resilient education systems. Using a qualitative literature review approach, the study draws on data from government reports, academic publications, and international organizations. The findings reveal that disasters exacerbate existing challenges, including infrastructure damage, psychosocial trauma, and the digital divide. Government initiatives such as the Disaster-Safe Education Unit Program (SPAB) and Disaster-Resilient Education are important steps, but their implementation remains uneven. The study concludes that a comprehensive approach integrating disaster risk reduction into the curriculum, enhancing teacher capacity, establishing emergency funding mechanisms, and prioritizing mental health support is crucial for creating education systems that can withstand future crises.

Keywords

Educational Resilience, Post-COVID-19, Disaster Management, Education Policy, Indonesia



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 merupakan salah satu krisis terbesar yang pernah mengguncang dunia pendidikan modern. Wabah ini tidak hanya menghentikan aktivitas pembelajaran tatap muka, tetapi juga memaksa seluruh pemangku kepentingan pendidikan beradaptasi secara cepat dan tidak terencana. Di Indonesia, lebih dari 60 juta peserta didik mengalami perubahan drastis dalam sistem belajar mereka selama dua tahun, mulai dari penutupan sekolah, beralih ke pembelajaran jarak jauh, hingga pembatasan interaksi sosial. Situasi ini menimbulkan guncangan serius dalam keberlangsungan proses pendidikan, terutama karena sistem pendidikan nasional belum memiliki kesiapan penuh menghadapi krisis berskala

global seperti pandemi. Konsekuensi pandemi tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek akademik, tetapi juga memberikan dampak luas pada kondisi psikologis, sosial, emosional, dan digital peserta didik maupun tenaga pendidik. Minimnya interaksi sosial menyebabkan meningkatnya perasaan isolasi, kebosanan, dan stres pada peserta didik. Sebagian besar siswa mengalami penurunan motivasi belajar akibat keterbatasan pendampingan, kondisi rumah yang tidak kondusif, serta minimnya akses terhadap fasilitas pembelajaran daring. Ketika proses pendidikan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, berbagai bencana alam yang melanda Indonesia semakin memperburuk situasi yang telah rapuh tersebut. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terdapat lebih dari 3.800 kejadian bencana sepanjang tahun 2023 yang berdampak pada 2.700 satuan pendidikan di berbagai wilayah. Bencana-bencana tersebut tidak hanya merusak infrastruktur sekolah, tetapi juga mengganggu proses belajar dalam jangka waktu yang tidak menentu. Peserta didik yang baru mulai memulihkan kondisi pascapandemi kembali dihadapkan pada risiko kehilangan kesempatan belajar akibat kerusakan ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas pendukung lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia menghadapi ancaman yang bersifat berlapis dan kompleks. Selain merusak sarana prasarana, bencana alam juga memperburuk kondisi sosial dan psikologis peserta didik. Trauma yang muncul selama pandemi belum sepenuhnya pulih ketika bencana susulan kembali melanda. Anak-anak di daerah terdampak mengalami kecemasan, ketakutan, dan rasa tidak aman yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat menghambat proses pembelajaran dan perkembangan emosional mereka. Guru pun mengalami tekanan mental yang serupa karena mereka harus mengelola pembelajaran di tengah berbagai keterbatasan sambil memberikan dukungan emosional kepada peserta didik. Dengan demikian, pemulihan pendidikan pascapandemi semakin sulit dicapai karena beban psikososial yang terus meningkat.

Pandemi turut mengungkap kelemahan struktural dalam sistem pendidikan, terutama terkait kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat. Pembelajaran jarak jauh diterapkan tanpa persiapan teknologi dan pedagogik yang memadai, sementara kebijakan mitigasi bencana belum terintegrasi secara sistematis dalam kurikulum maupun tata kelola sekolah. Ketidaksiapan ini menyebabkan banyak sekolah tidak mampu menerapkan sistem pembelajaran alternatif yang efektif ketika terjadi bencana susulan. Selain itu, learning loss yang terjadi selama pandemi semakin membesar akibat kesenjangan digital, keterbatasan akses internet, kelelahan mental, serta tekanan psikologis yang dialami peserta didik. Berbagai kondisi tersebut

menegaskan bahwa pemulihan pendidikan pascapandemi harus dilakukan secara holistik, mencakup dimensi fisik, akademik, sosial, emosional, dan digital. Pemulihan tidak dapat hanya berfokus pada perbaikan infrastruktur atau peningkatan capaian akademik semata, tetapi harus melibatkan seluruh aspek yang memengaruhi kesejahteraan dan keberlanjutan belajar peserta didik. Pendekatan komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa pendidikan dapat kembali pulih dan berfungsi dengan baik di tengah tantangan yang terus berlangsung. Di sisi lain, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara kondisi nyata pendidikan di lapangan dengan arah kebijakan pendidikan pada tingkat nasional, sehingga membutuhkan evaluasi dan penyesuaian lebih lanjut.

Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai dampak bencana pascapandemi menjadi sangat penting sebagai landasan bagi perumusan kebijakan pendidikan yang lebih adaptif, inklusif, dan resilien. Sistem pendidikan harus dirancang untuk mampu bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai jenis ancaman, baik yang bersifat biologis seperti pandemi maupun yang bersifat geologis dan hidrometeorologis seperti bencana alam. Upaya mewujudkan pendidikan yang tangguh bencana harus mengedepankan prinsip keberlanjutan, pemerataan, serta perlindungan terhadap hak belajar setiap peserta didik. Dengan demikian, pendidikan Indonesia dapat dipersiapkan untuk menghadapi krisis di masa depan secara lebih terencana dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research) dengan sumber-sumber sebagai berikut: Dokumen resmi pemerintah (Permendikbud SPAB 2019, RPJMN 2020–2024, Renstra Kemendikbudristek). Laporan lembaga nasional (BNPB, Bappenas) dan internasional (UNESCO, UNICEF, OECD). Artikel ilmiah yang relevan (2020–2023). Data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi pola, dampak, dan strategi penanganan pendidikan pascabencana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk dan Dampak Bencana terhadap Pendidikan Pascapandemi

Bencana alam yang terjadi pada periode pascapandemi membawa implikasi multidimensional yang sangat kompleks terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Dampaknya tidak hanya terlihat dari rusaknya sarana prasarana fisik sekolah, tetapi juga mencakup gangguan pada aspek-aspek psikologis, sosial, akademik, hingga digital. Pada tataran fisik, bencana seperti banjir, gempa bumi, erupsi gunung berapi,

dan tanah longsor merusak ribuan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas sanitasi yang merupakan elemen esensial bagi keberlangsungan proses pembelajaran. Kerusakan tersebut menghambat fungsi sekolah sebagai tempat belajar yang aman dan nyaman, sekaligus menunjukkan rapuhnya infrastruktur pendidikan dalam menghadapi ancaman bencana berulang. Kondisi ini menegaskan bahwa pendidikan Indonesia berada dalam tekanan struktural yang signifikan pascapandemi. Selain kerusakan fisik, berbagai daerah terdampak bencana juga menunjukkan lemahnya penerapan prinsip pembangunan berbasis mitigasi pada infrastruktur pendidikan. Banyak sekolah dibangun tanpa mempertimbangkan letak geografis, tingkat kerawanan bencana, maupun analisis risiko lingkungan. Hal ini mengakibatkan kerusakan yang sama terulang hampir setiap tahun, terutama di daerah-daerah rawan bencana yang terus mengalami banjir siklus, letusan gunung berapi, atau gempa. Proses rehabilitasi yang memakan biaya besar membebani anggaran pemerintah daerah, yang pada banyak kasus tidak memiliki kapasitas fiskal untuk melakukan perbaikan menyeluruh. Akibatnya, kegiatan belajar-mengajar harus dilakukan di tenda darurat, ruang kelas sementara, atau menumpang di sekolah lain, sehingga mengganggu konsentrasi peserta didik dan kualitas pembelajaran secara keseluruhan.

Dampak psikososial yang ditimbulkan bencana juga sangat signifikan bagi peserta didik maupun tenaga pendidik. Banyak peserta didik yang masih memikul trauma akibat pandemi Covid-19 kembali menghadapi tekanan emosional akibat kehilangan tempat tinggal, perpisahan keluarga, dan rasa takut berkepanjangan terhadap ancaman bencana susulan. Situasi ini memicu gangguan psikologis berupa kecemasan, stres, depresi, hingga penurunan motivasi belajar. Anak-anak yang mengalami trauma berkepanjangan menunjukkan kecenderungan menarik diri, sulit berkonsentrasi, dan mengalami hambatan dalam berinteraksi sosial. Guru pun mengalami beban emosional serupa karena harus mengajar dalam kondisi serba terbatas sekaligus berperan sebagai penyedia dukungan emosional bagi siswa. Ketidaksiapan guru dalam bidang konseling dan pendampingan psikologis menjadi tantangan tersendiri dalam mendukung pemulihan pendidikan pascabencana

Pada sisi akademik, bencana menyebabkan terhentinya proses pembelajaran dalam kurun waktu yang tidak dapat diprediksi, sehingga memperparah learning loss yang telah terjadi selama pandemi. Banyak peserta didik mengalami penurunan signifikan dalam kemampuan literasi, numerasi, dan keterampilan berpikir kritis. Wilayah-wilayah rawan bencana memiliki tingkat learning loss yang lebih tinggi akibat keterbatasan infrastruktur, kurangnya pendampingan akademik, dan

terputusnya kegiatan belajar dalam jangka panjang. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi hasil belajar saat ini, tetapi juga berpotensi menghambat perkembangan jangka panjang peserta didik, terutama dalam membangun kecakapan abad 21 yang menjadi tuntutan masa depan. Learning loss yang semakin mendalam dapat menciptakan ketimpangan capaian akademik antarwilayah, memperburuk kesenjangan pendidikan nasional, dan mengancam misi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Bencana pascapandemi juga memperlebar kesenjangan digital yang telah menjadi masalah krusial sejak masa pembelajaran jarak jauh. Kerusakan infrastruktur jaringan listrik dan telekomunikasi membuat pembelajaran daring tidak dapat dilaksanakan secara optimal sebagai alternatif ketika sekolah tidak dapat beroperasi. Ketidakmerataan akses internet dan perangkat digital semakin menegaskan adanya digital divide antara daerah perkotaan dan pedesaan. Di banyak wilayah, peserta didik terpaksa belajar tanpa dukungan teknologi, sehingga tertinggal semakin jauh dibandingkan anak-anak di kota besar yang memiliki akses internet stabil dan perangkat memadai. Dengan demikian, digitalisasi pendidikan sebagai strategi modernisasi menjadi sulit dijalankan di daerah rentan bencana, dan teknologi belum dapat berfungsi sebagai solusi pembelajaran darurat yang inklusif. Selain itu, tekanan sosial-ekonomi yang dialami keluarga terdampak bencana turut memberikan implikasi besar terhadap keberlanjutan pendidikan anak. Banyak keluarga kehilangan mata pencaharian, tempat tinggal, dan anggota keluarga akibat bencana. Dalam kondisi demikian, pendidikan sering kali menjadi prioritas kedua setelah pemenuhan kebutuhan dasar. Tidak sedikit peserta didik terpaksa menghentikan sekolah untuk membantu orang tua bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi kemiskinan yang memburuk memperbesar risiko anak putus sekolah permanen, terutama di jenjang pendidikan menengah. Situasi ini menegaskan bahwa dampak bencana tidak hanya mengganggu kegiatan belajar, tetapi juga mengancam masa depan generasi muda dan memperburuk ketidaksetaraan sosial. Secara menyeluruh, rangkaian dampak yang timbul menunjukkan bahwa bencana pascapandemi memberikan tekanan sistemik terhadap pendidikan nasional. Setiap dimensi—fisik, psikologis, sosial, akademik, digital, maupun ekonomi—saling berkaitan dan memperburuk satu sama lain. Pemulihan pendidikan membutuhkan pendekatan yang komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan. Pendekatan parsial seperti perbaikan gedung sekolah saja tidak cukup untuk mengembalikan keberfungsian sistem pendidikan. Diperlukan intervensi multidimensi yang menyentuh kebutuhan fisik, psikososial, akademik, sosial-

ekonomi, serta penguatan tata kelola pendidikan. Bencana pascapandemi pada akhirnya mengajarkan bahwa sistem pendidikan Indonesia masih rentan terhadap situasi krisis dan membutuhkan reformasi menyeluruh untuk membangun ketahanan pendidikan jangka panjang.

Kebijakan Pemerintah dalam Pemulihan Pendidikan Pascabencana

Sebagai respons terhadap berbagai dampak tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan sejumlah kebijakan pemulihan pendidikan. Salah satu program utama adalah Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019. Program SPAB menekankan pentingnya kesiapsiagaan sekolah melalui analisis risiko bencana, pelaksanaan simulasi evakuasi secara berkala, pembentukan Tim Siaga Bencana Sekolah, serta integrasi materi mitigasi dalam kurikulum pembelajaran. Tujuan utama SPAB adalah menciptakan sekolah yang aman, tangguh, dan berbudaya sadar risiko. Dengan integrasi mitigasi bencana dalam pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami tindakan penyelamatan dasar serta mampu beradaptasi dalam situasi darurat. Namun, implementasi program ini masih menghadapi tantangan besar. Banyak sekolah tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk menerapkan SPAB, baik dari aspek pendanaan, kompetensi guru, maupun sarana pendukung. Di beberapa daerah, pelatihan kesiapsiagaan bencana belum terlaksana secara merata, sehingga kapasitas sekolah dalam merespons bencana masih terbatas. Hal tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebijakan nasional dengan kemampuan sekolah untuk menerapkannya.

Selain program SPAB, pemerintah bekerja sama dengan BNPB melalui Program Pendidikan Tangguh Bencana untuk meningkatkan kapasitas guru, menyusun modul kebencanaan, dan memperkuat pembelajaran darurat. Namun program ini pun menghadapi kendala berupa minimnya pendanaan daerah, lemahnya koordinasi lintas lembaga, dan terbatasnya akses pelatihan bagi sekolah di wilayah pedalaman. Pemerintah sebenarnya telah menyediakan layanan konseling pascabencana, tetapi jumlah tenaga profesional tidak sebanding dengan kebutuhan. Akibatnya, guru sering kali harus berperan sebagai tenaga konselor, meskipun tidak memiliki latar belakang psikologi atau pelatihan khusus. Upaya rehabilitasi infrastruktur sekolah juga terkendala oleh persoalan administratif seperti status tanah yang belum bersertifikat, sehingga sekolah tidak dapat menerima bantuan pembangunan atau perbaikan fasilitas. Kendala administratif ini semakin memperlambat proses pemulihan pendidikan.

Kebijakan pembelajaran fleksibel, termasuk blended learning, sebenarnya dapat menjadi solusi sementara ketika sekolah mengalami kerusakan. Namun, implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan optimal karena ketimpangan teknologi antarwilayah yang masih tinggi. Akses internet yang tidak stabil, keterbatasan perangkat digital, dan kurangnya literasi teknologi baik bagi guru maupun siswa menjadi faktor penghambat utama. Dengan demikian, kebijakan pemerintah dalam pemulihan pendidikan pascabencana memerlukan penguatan dari aspek pendanaan, koordinasi, pemerataan pelatihan, serta penataan regulasi agar dapat berjalan efektif dan menghasilkan dampak yang signifikan.

Strategi Penguatan Ketahanan Pendidikan Di Masa Depan

Untuk membangun sistem pendidikan yang lebih adaptif dan tangguh terhadap ancaman bencana di masa depan, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Integrasi kurikulum mitigasi bencana menjadi upaya strategis yang harus segera diwujudkan. Melalui pendekatan project-based learning, pembelajaran kontekstual berbasis kearifan lokal, dan kolaborasi lintas mata pelajaran, peserta didik dapat memahami risiko bencana secara holistik dan memperoleh keterampilan menghadapi situasi darurat. Keberhasilan program "Sekolah Siaga Merapi" di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa pembelajaran mitigasi bencana dapat diterapkan dengan efektif jika didukung oleh kurikulum yang relevan dan keterlibatan masyarakat lokal. Pendekatan serupa dapat diperluas ke wilayah-wilayah rawan bencana lainnya di Indonesia.

Selain integrasi kurikulum, penguatan kapasitas guru dan sekolah merupakan kunci dalam membangun sistem pendidikan yang tangguh. Guru perlu dilatih dalam manajemen risiko bencana, konseling dasar bagi korban bencana, pembelajaran darurat, serta teknik evakuasi dan penanganan pascabencana. Pelatihan semacam ini harus dilakukan secara berkala dan terprogram, bukan hanya bersifat seremonial. Setiap sekolah juga perlu memiliki Tim Siaga Bencana yang aktif, terlatih, serta memiliki protokol penanganan darurat yang tersusun dengan baik. Pembentukan Dana Darurat Pendidikan atau Education Emergency Fund menjadi langkah strategis yang dapat mempercepat pemulihan pascabencana. Melalui dana tersebut, sekolah dapat melakukan rehabilitasi cepat, menyediakan ruang kelas sementara, membeli perlengkapan belajar, serta memastikan akses internet tetap tersedia.

Penguatan ketahanan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari pembangunan infrastruktur digital yang merata. Pemerintah perlu memperluas jaringan internet ke daerah terpencil, menyediakan perangkat digital yang terjangkau, serta

mengembangkan platform pembelajaran offline yang dapat digunakan ketika jaringan internet terganggu. Selain aspek teknologi, dukungan psikososial juga harus menjadi prioritas. Layanan konseling kelompok, terapi bermain, pendekatan seni, serta keterlibatan relawan psikologi dapat membantu pemulihan mental siswa dan guru. Kearifan lokal dan pelibatan komunitas juga harus dijadikan bagian dari strategi ketahanan pendidikan. Budaya gotong royong, adat siaga bencana, dan ritual kesiapsiagaan telah terbukti efektif membantu masyarakat merespons bencana lebih cepat dan tepat. Dengan mengintegrasikan pendekatan lokal, teknologi, kebijakan pemerintah, dan penguatan kapasitas guru, sistem pendidikan Indonesia dapat dibangun menjadi lebih tangguh, adaptif, dan siap menghadapi berbagai bentuk bencana di masa depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai dampak bencana terhadap pendidikan pascapandemi, dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan Indonesia menghadapi tantangan multidimensi yang tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik sekolah, tetapi juga meliputi dampak psikososial, akademik, digital, dan sosial-ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemulihan pendidikan pascapandemi belum sepenuhnya selesai ketika bencana baru muncul dan memperburuk keadaan. Kombinasi antara trauma pandemi dan kerentanan terhadap bencana alam menempatkan peserta didik dan tenaga pendidik pada situasi yang sangat rentan, sehingga memerlukan intervensi yang sistematis dan berkelanjutan. Berbagai permasalahan yang muncul memperlihatkan bahwa ketangguhan pendidikan Indonesia masih memerlukan penguatan signifikan dalam berbagai aspek. Dari sisi fisik, kerusakan sarana prasarana akibat bencana terus berulang karena minimnya perencanaan berbasis mitigasi dalam pembangunan sekolah. Kondisi ini menyebabkan proses pembelajaran terganggu dan mengharuskan siswa belajar di tenda atau menumpang di sekolah lain, yang pada akhirnya menurunkan kualitas pembelajaran. Dampak psikososial yang muncul pun tidak kalah serius. Peserta didik dan guru mengalami tekanan emosional, kecemasan, stres, bahkan depresi akibat rangkaian krisis yang mereka hadapi. Kondisi mental yang tidak stabil ini berdampak langsung pada motivasi belajar, konsentrasi, dan semangat mengajar, sehingga memengaruhi keberhasilan pendidikan secara keseluruhan. Dampak akademik berupa learning loss semakin terasa pascapandemi ketika bencana menyebabkan terhentinya pembelajaran. Penurunan kemampuan literasi, numerasi, serta meningkatnya angka putus sekolah menjadi bukti bahwa sistem pendidikan belum mampu memulihkan capaian belajar siswa secara optimal. Hal ini diperburuk

oleh kesenjangan digital yang membuat pembelajaran daring tidak dapat diakses secara merata di seluruh daerah, terutama ketika infrastruktur internet dan listrik rusak akibat bencana. Ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan pun semakin melebar, sehingga menghambat tercapainya pemerataan kualitas pendidikan nasional. Menghadapi tantangan tersebut, pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan seperti SPAB, Pendidikan Tangguh Bencana, pemulihan psikososial, dan rehabilitasi infrastruktur pendidikan. Namun implementasi kebijakan ini masih menghadapi kendala, mulai dari minimnya pendanaan di daerah, lemahnya koordinasi lintas sektor, hingga hambatan administratif dalam proses rehabilitasi. Kebijakan pembelajaran fleksibel seperti blended learning memang memberikan alternatif, tetapi belum dapat diterapkan secara efektif di daerah yang memiliki keterbatasan teknologi. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi guru, serta penyediaan dukungan teknis agar kebijakan dapat berjalan sesuai tujuan. Untuk memperkuat ketahanan pendidikan terhadap bencana di masa depan, strategi komprehensif perlu diterapkan secara berkelanjutan. Integrasi kurikulum mitigasi bencana, pelatihan guru dalam manajemen risiko, pembentukan dana darurat pendidikan, dan penguatan infrastruktur digital merupakan langkah-langkah strategis yang dapat membantu sistem pendidikan lebih siap menghadapi krisis. Selain itu, pendekatan pemulihan psikososial jangka panjang perlu menjadi prioritas untuk mengatasi dampak emosional yang dialami peserta didik dan guru. Pelibatan masyarakat dan penguatan kearifan lokal juga terbukti efektif dalam membangun sekolah yang siaga dan tangguh menghadapi bencana. Secara keseluruhan, pendidikan Indonesia hanya dapat menjadi tangguh apabila mampu mengintegrasikan aspek mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan dalam kebijakan serta praktik pembelajaran. Pemulihan pascapandemi dan penanganan dampak bencana harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa peserta didik tetap mendapatkan hak pendidikan yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan meskipun berada dalam situasi krisis. Dengan komitmen bersama dan strategi yang tepat, sistem pendidikan Indonesia dapat menjadi lebih resilien, adaptif, dan siap menghadapi tantangan bencana di masa mendatang.

REFERENCES

- Astuti, Lilis. "Dampak Psikososial Siswa pada Situasi Pascabencana dan Pascapandemi." *Jurnal Psikologi Pendidikan Indonesia*, Vol. 10, No. 2 (2021): 134.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Data Kejadian Bencana Nasional Tahun 2023. Jakarta: BNPB, 2023.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Panduan Pelaksanaan Pendidikan Tangguh Bencana. Jakarta: BNPB, 2021.
- Fadillah, R. "Kerentanan Infrastruktur Pendidikan Pascabencana." *Jurnal Manajemen Pendidikan Nasional*, Vol. 1, No. 3 (2021): 12.
- Hasanah, Rina. "Pelatihan Guru Tanggap Bencana di Wilayah Rawan Bencana NTT." *Jurnal Pemberdayaan Pendidikan*, Vol. 6, No. 2 (2023): 67.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Jakarta: Kemendikbud, 2019.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Rencana Strategis 2020–2024. Jakarta: Kemendikbudristek, 2020.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Rencana Strategis Pendidikan Tangguh Bencana 2023–2027. Jakarta: Kemendikbudristek, 2023.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024. Jakarta: Bappenas, 2020.
- OECD. Resilient Education Systems Post-COVID-19: Policy Lessons from Emerging Economies. Paris: OECD Publishing, 2021.
- Pratiwi, Diah. "Implementasi Proyek Sekolah Siaga Merapi di Sleman sebagai Model Integrasi Kurikulum Kebencanaan." *Jurnal Pendidikan dan Mitigasi Bencana*, Vol. 7, No. 1 (2022): 54.
- Rahmawati, L. "Evaluasi Pendidikan Mitigasi Bencana di Indonesia." *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 2 (2022): 19.
- Suharyono, B. Integrasi Mitigasi Bencana dalam Kurikulum Sekolah. Bandung: Alfabeta, 2020.
- UNDRR. Build Back Better in Recovery, Rehabilitation and Reconstruction. Geneva: United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2020.
- UNESCO. Global Education Monitoring Report 2021: The Impact of COVID-19 on Education Systems. Paris: UNESCO, 2021.

Tamilis Synex: Multidimensional Collaboration

UNICEF Indonesia. Digital Learning in Post-COVID Recovery. Jakarta: UNICEF, 2022.